

SIMBA

Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)

ISSN Online 2686-1771

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018)

Rima Mega Sukmawati
Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi
email: rima.mega.0903@gmail.com

Abstract

Economic growth is influenced by various factors, including government spending. It be seen from the amount of regional spending. The amount of regional expenditure contained in each Regency / City in East Java Province can strengthen or weaken the relationship between Local Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to indirect economic growth. This study aims to prove empirically the effect of Local Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on economic growth with regional spending as a moderating variable in districts / cities in East Java Province 2013-2018. Data collection was done by means of documentation. The data collected was obtained from related agencies such as: District / City Gross Regional Domestic Product in East Java Province and district / city government financial statistics in East Java Province through the website www.bps.go.id. The sampling technique used was the census method. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program version 17. The results show that Local Own Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Economic Growth in Regencies / Cities in East Java Province. Local Own Revenue and General Allocation Fund have a positive effect on economic growth by moderating regional spending, while the Special Allocation Fund has a negative and significant effect on moderated economic growth with regional spending in East Java Province

Keywords: *Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth, Regional Expenditure.*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah yang dapat dilihat dari besarnya belanja daerah. Besarnya belanja daerah yang terdapat pada masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan diperoleh dari instansi terkait seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur dan statistik keuangan pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur melalui website

www.bps.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan moderasi belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di moderasi dengan belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah desentralistik. Menurut UU No.32 Tahun 2004, pemberian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI adalah desentralisasi. Keputusan penerapan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi. Hal ini dikarenakan agar daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Oleh karena itu perlunya penerapan desentralisasi menuntut adanya pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain yaitu dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui penggunaan Belanja Daerah (BD) sebagai pemoderasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018, serta untuk membuktikan secara empiris bahwa Belanja Daerah dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media penerapan teori dan konsep akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah serta dapat meningkatkan wawasan pengetahuan melalui berbagai temuan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan yang diterima serta upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan masyarakat dalam menggali dan mengelola sumber daya pada daerah

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kegiatan perekonomian yang dapat memicu peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai peningkatan *gross national product (GNP)* pendapatan nasional riil ekonomi lebih dari jangka waktu yang lama tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Jhingan & Guritno, 2016). Dari penjelasan uraian di atas disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan peningkatan standar hidup dan penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Belanja Daerah

Menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004, Belanja daerah adalah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang digunakan sebagai pengurangan nilai guna memenuhi kewajiban daerah.. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah adalah pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakui sebagai kewajiban daerah.. Dalam penyajiannya anggaran belanja daerah dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian obyek belanja (Moh. Khusaini, 2018:164). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan adalah kelompok belanja tidak langsung. Sedangkan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga adalah kelompok belanja langsung.

Menurut Amin (2019:89) belanja daerah merupakan anggaran dalam satu periode pemerintahan yang merupakan kewajibab pemerintah daerah yang diambil dari rekening kas umum daerah. Belanja daerah dalam APBD merupakan komponen penting yang banyak mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana public melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan public. Selain itu belanja daerah juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah.

Pendapatan Asli daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1. Intensifikasi, yaitu peningkatan intensif untuk mengoptimalkan PAD. Dalam hal ini peningkatan intensif berupa operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak. 2. Ekstensifikasi, yaitu pengembangan subjek dan objek pajak untuk mengoptimalkan PAD. 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

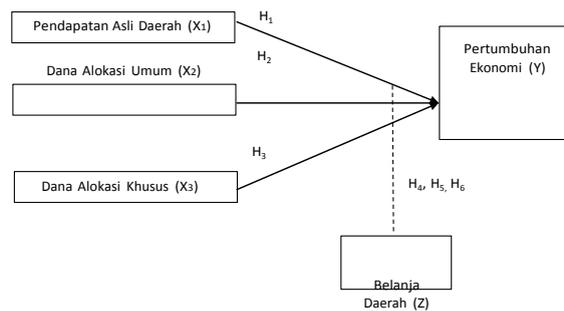
Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, dalam Undang-Undang No. 33 Tahun, 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi (Amin, 2019:72). Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Penggunaan DAK dipakai dalam kebijakan *transfer fiscal* untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah, penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK pemerintah pusat menghendaki adanya benefit *spillover effect* sehingga meningkatkan standar umum, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam *matching grant* (Amin, 2019:72).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti membuat kerangka konseptual untuk mempermudah hubungan antar variabel dan alur penelitian dengan model sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Penelitian

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini menguji adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen dengan belanja daerah sebagai variabel moderasi.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula bahwa peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Marwani, Darwanis, Abdullah, 2013). Dalam hal ini peningkatan PAD harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain naiknya pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil – hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian, Maryati dan Endrawati (2010), dan Arina, Koleangan dan Enka (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD (Talanganin. Dkk, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi kenaikan DAU yang diberikan oleh pemerintah daerah maka akan mempengaruhi kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hasil – hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Talangamin, Dkk (2018), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian Putri (2015) diperoleh hasil penelitian yang berbeda yaitu DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 Tahun, 2004). Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Talangamin. Dkk, 2018). Dengan kata lain peningkatan DAK dari pemerintah pusat diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil – hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Talangamin, Dkk (2018), menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Arina, Dkk (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Pengaruh Belanja Daerah Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dengan demikian Jika PAD suatu daerah meningkat dan didukung dengan tingginya belanja daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Dkk (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Hasil penelitian berbeda diperoleh dari penelitian Rahman dan Chamelia (2015) menyatakan bahwa tidak ada berpengaruh PAD terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Berdasarkan telaah teori dan hasil - hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Belanja Daerah dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 –

2018

Pengaruh Belanja Daerah Memoderasi Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi deficit, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten / kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Diharapkan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian, hasil moderasi Belanja Daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Dkk (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Hasil penelitian berbeda diperoleh dari penelitian Juwari, Setyadi, dan Ulfah (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negative terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Berdasarkan telaah teori dan hasil - hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Belanja Daerah dapat memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Pengaruh Belanja Daerah Memoderasi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan (Amin, 2019:55). Jika dikaitkan, maka dengan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan meningkatkan belanja daerah untuk keperluan dari daerah tersebut. Jika belanja naik, diharapkan perekonomian daerah juga akan naik. Dengan demikian, hasil moderasi Belanja Daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

Penelitian yang dilakukan oleh Juwari, Dkk (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Berdasarkan telaah teori dan hasil - hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

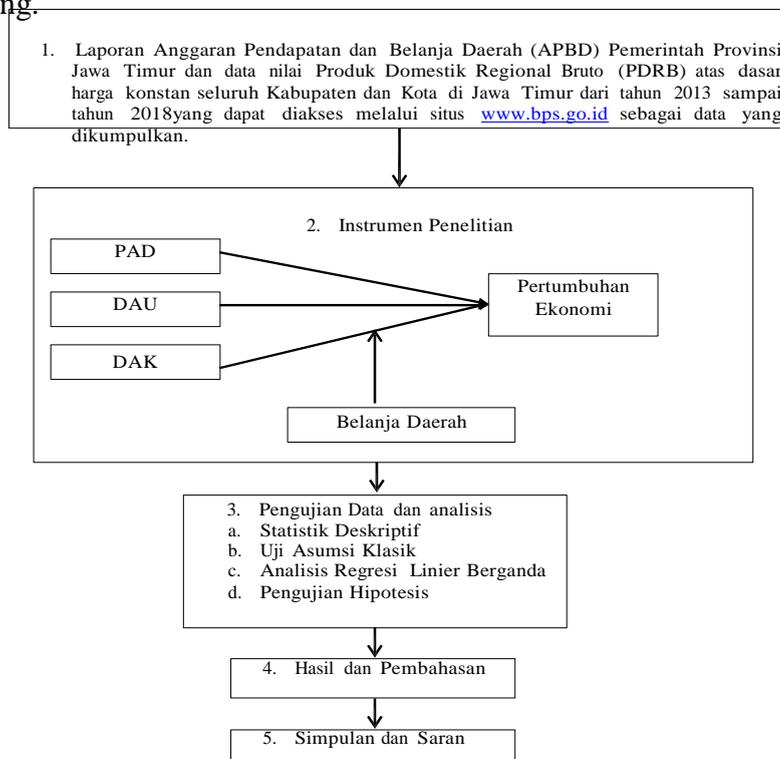
H6: Belanja Daerah dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis dan penelitian kausalitas, pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji suatu dugaan adanya hubungan antar variabel. Penelitian kausalitas menganalisis hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau disebut sebagai variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderasi.

Horizon waktu yang digunakan adalah data *time series*, yaitu sekumpulan data dari suatu penelitian yang dilakukan dalam rentang interval waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun skema dibawah ini adalah gambaran rancangan dari penelitian sekarang.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sensus.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DAK serta satu variabel moderasi yaitu belanja daerah, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi.

Definisi Operasional

Untuk menentukan skala masing-masing variabel dalam suatu penelitian dapat menggunakan jenis indikator definisi operasional. Adapun masing-masing dari variabel dependen, independen dan moderasi akan diuraikan sebagai berikut:

Variabel Dependen

(Sugiyono, 2016:4) mengatakan bahwa variabel terikat adalah variabel pengaruh atau penyebab adanya variabel bebas. Variabel terikat juga dapat disebut dengan variabel dependen yang mana variabel tersebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan berkelanjutan yang kuantitatif di Indonesia berupa output atau pendapatan per kapita negara disertai dengan ekspansi tenaga kerjanya, konsumsi, modal, dan volume perdagangan (Jhingan, 2016).

Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini juga dapat disebut dengan variabel independen, stimulus, predictor atau antecedent. Adapun variabel independen merupakan variabel yang menyebabkan serta mempengaruhi variabel dependen dalam mengalami perubahan (Sugiyono, 2016:4).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Variabel Moderasi

Variabel independen memiliki hubungan dengan variabel dependen yang dapat diperkuat ataupun diperlemah dengan sebuah variabel yang disebut variabel moderasi (Sugiyono, 2016:4). Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya (melalui media perantara). Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan diperoleh dari instansi terkait seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode 2013 – 2018 dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013 – 2018 yang di dalamnya berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan realisasi Belanja Daerah melalui *website* www.bps.go.id.

Instrumen Penelitian

Produk Domestik Regional Bruto

Angka pertumbuhan ekonomi diambil dari data nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2018 (Juwari, 2016).

Sumber: www.bps.go.id/index.php/publikasi.

Belanja Daerah

Belanja daerah diukur dari realisasi belanja daerah pada Kabupaten / kota di Jawa Timur (Juwari, 2016). Sumber: www.bps.go.id/index.php/publikasi

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diukur dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan PAD yang sah pada Kabupaten/ kota Jawa Timur (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Sumber: www.bps.go.id/index.php/publikasi

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum diukur dari Jumlah penerimaan transfer DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Sumber: www.bps.go.id/index.php/publikasi

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus diukur dari Jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Kabupaten / kota Jawa Timur (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Sumber: www.bps.go.id/index.php/publikasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN[Times New Roman 12 bold, spasi 1,15]

Data Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 sampel, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di seluruh Provinsi Jawa Timur, jumlah data yang diperoleh pada tahun 2013-2018 adalah 228 data (6 periode X 38 sampel), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Daftar Nama Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur

1.	Kab. Tulungagung	20.	Kab. Lamongan
2.	Kab. Tuban	21.	Kab. Kediri
3.	Kab. Trenggalek	22.	Kab. Jombang
4.	Kab. Sumenep	23.	Kab. Jember
5.	Kab. Situbondo	24.	Kab. Gresik
6.	Kab. Sidoarjo	25.	Kab. Bondowoso
7.	Kab. Sampang	26.	Kab. Bojonegoro
8.	Kab. Probolinggo	27.	Kab. Blitar
9.	Kab. Ponorogo	28.	Kab. Banyuwangi
10.	Kab. Pasuruan	29.	Kab. Bangkalan
11.	Kab. Pamekasan	30.	Kota Surabaya
12.	Kab. Pacitan	31.	Kota Probolinggo
13.	Kab. Ngawi	32.	Kota Pasuruan
14.	Kab. Nganjuk	33.	Kota Mojokerto
15.	Kab. Mojokerto	34.	Kota Malang
16.	Kab. Malang	35.	Kota Madiun
17.	Kab. Magetan	36.	Kota Kediri
18.	Kab. Madiun	37.	Kota Blitar
19.	Kab. Lumajang	38.	Kota Batu

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur dengan variabel PAD, DAU, DAK dan belanja daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Statistik Deskriptif (Dalam Log 10)

	N	Minimum	Maximum	Mean
PAD	228	7,773	9,711	8,409
DAU	228	8,548	9,233	8,933
DAK	228	6,853	8,743	8,096
BD	228	8,708	9,913	9,242
PDRB	228	9,537	11,588	10,321
Valid N (listwise)	228			

Sumber: Output SPSS Versi 17

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai K-S sebesar 1,334 dengan probabilitas signifikan 0,057 dan nilainya $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		228
<i>Normal Parameters^{a, b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.19530592
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.088
	<i>Positive</i>	.088
	<i>Negative</i>	-.058
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.334
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS versi 17

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi persamaan regresi pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	<i>Change Statistics</i>				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.886 ^a	.785	.782	.196609	.785	272.817	3	224	.000	1.853

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS versi 17

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan nilai $d < d < 4-d$, yaitu $1.7176 < 1.853 < 2,1801$ yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Berikut hasil pengujian multikolinieritas dalam persamaan regresi:

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
PAD	.664	1.506
DAU	.537	1.861
DAK	.703	1.423
BD	.529	2.769

Sumber: Output SPSS versi 17

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1, sehingga tidak terdapat gangguan multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel Hasil Uji Heteroskedastitas Spearman Rho

			<i>Correlations</i>			<i>Unstandardized Residual</i>
			PAD	DAU	DAK	
<i>Spearman's rho</i>	PAD	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.710**	.473**	.035
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.000	.000	.598
		<i>N</i>	228	228	228	228
	DAU	<i>Correlation Coefficient</i>	.710**	1.000	.532**	-.020
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.	.000	.766
		<i>N</i>	228	228	228	228
	DAK	<i>Correlation Coefficient</i>	.473**	.532**	1.000	.025
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.	.704
		<i>N</i>	228	228	228	228
<i>Unstandardized Residual</i>		<i>Correlation Coefficient</i>	.035	-.020	.025	1.000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.598	.766	.704	.
		<i>N</i>	228	228	228	228

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil korelasi PAD, DAU, dan DAK memiliki nilai Signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya R square adalah 0,785, hal ini berarti 78,5% variabel PDRB dapat dijelaskan oleh PAD, DAU dan DAK sedangkan sisanya 21,5 % (100% - 78,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Sedangkan berdasarkan tabel 4.7 sampai 4.9 dijelaskan bahwa besarnya R square moderasi PAD adalah 0,745, hal ini berarti 74,5% variabel belanja daerah memperkuat pengaruh PAD terhadap PDRB, besarnya R square moderasi DAU adalah 0,677, hal ini berarti 67,7% variabel belanja daerah memperkuat pengaruh DAU terhadap PDRB, serta besarnya R square moderasi DAK adalah 0,735, hal ini berarti 73,5% variabel belanja daerah memperkuat pengaruh DAK terhadap PDRB

Persamaan Regresi

Hasil pengujian persamaan regresi adalah sebagai berikut ini:

Tabel Hasil Uji Regresi Tanpa Moderasi

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.067	.767		5.302	.000
	PAD	.864	.047	.699	18.398	.000
	DAU	1.025	.113	.383	9.058	.000
	DAK	.250	.040	.234	6.323	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel Hasil Uji Regresi Dengan Moderasi PAD

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.530	.769		4.590	.000
	PAD	.383	.226	.143	1.698	.091
	PAD*BD	.647	.074	.819	8.775	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel Hasil Uji Regresi Dengan Moderasi DAU

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.530	.769		4.589	.000
	DAU	.419	.458	.157	2.915	.011
	DAU*BD	2.105	.162	1.813	12.974	.000

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.530	.769		4.589	.000
	DAU	.419	.458	.157	2.915	.011
	DAU*BD	2.105	.162	1.813	12.974	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel Hasil Uji Regresi Dengan Moderasi DAK

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.530	.769		4.591	.000
	DAK*BD	-.358	.044	-.462	-8.066	.000

a. Dependent Variable: PDRB

- a) Pada penelitian ini untuk variabel PAD berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 18.398 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
- b) Pada penelitian ini untuk variabel DAU berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 9.058 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
- c) Pada penelitian ini untuk variabel DAK berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 6.323 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
- d) Pada penelitian ini untuk variabel PAD dengan belanja daerah sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 8.775 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel belanja daerah dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)
- e) Pada penelitian ini untuk variabel DAU dengan belanja daerah sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 12.974 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel belanja daerah dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
- f) Pada penelitian ini untuk variabel DAK dengan belanja daerah sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar -8.066 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel

belanja daerah dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK yang diikuti dengan kenaikan belanja daerah akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Uji F

Hasil uji F persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.637	3	10.546	272.817	.000 ^a
	Residual	8.659	224	.039		
	Total	40.296	227			

Berdasarkan hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 272.817 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis diatas, pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

PAD Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung 18.398 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensipotensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAU Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar 9.058 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan naiknya dana alokasi umum (DAU) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk

membiayai belanja daerah. Oleh karena itu, DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lainnya, seperti DAK maupun dana perimbangan. DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional (Amin, 2019:69).

DAK Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRDB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar 6.323 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan naiknya dana alokasi khusus (DAK) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Oleh karena itu, DAK dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional (Amin, 2019:69). DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan, seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU. 2) Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. 3) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

Belanja Daerah Dapat Memoderasi PAD dan Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRDB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar 8.775 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu, Belanja Daerah dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung dengan tingginya Belanja daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni (2013) dan Lisa, Priyagus, dan Roy (2017) yang menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah

Belanja Daerah Dapat Memoderasi DAU dan Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRDB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar 12.974 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu, Belanja Daerah dapat memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya dana alokasi umum (DAU) didukung dengan tingginya Belanja daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Dkk (2013) dan Juwari, Dkk (2015) yang menyatakan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Belanja Daerah Dapat Memoderasi DAK dan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRDB)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar -8.066 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel DAK berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu, Belanja Daerah dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya dana alokasi khusus (DAK) didukung dengan tingginya Belanja daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Dkk (2013) dan Juwari, Dkk (2015) yang menyatakan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD mempunyai t hitung sebesar 0.649 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).
2. DAU mempunyai t hitung sebesar 56.829 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).
3. DAK mempunyai t hitung sebesar 6.810 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).
4. Moderasi PAD dengan belanja daerah mempunyai t hitung sebesar sebesar 8.775 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal tersebut berarti variabel DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi.
5. Moderasi DAU dengan belanja daerah mempunyai t hitung sebesar 12.974 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal tersebut berarti variabel DAK

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi.

6. Moderasi DAK dengan belanja daerah mempunyai t hitung sebesar sebesar -8.066 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), hal tersebut berarti variabel DAK berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja daerah sebagai pemoderasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Indeks pengukuran PDRB yang digunakan sebagai ukuran pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini hanya diambil dari data nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing penelitian terdahulu dalam menentukan indeks pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Periode penelitian ini beberapa data yang diukur, masih menampilkan data estimasi sementara. Hal ini dikarenakan pada periode tahun 2018 laporan realisasi APBN kota dan kabupaten belum sepenuhnya diserahkan ke BPS.
3. Penelitian ini hanya menyertakan variabel PAD, DAU dan DAK, masih belum menyertakan variabel yang lain seperti Dana Bagi Hasil, atau laporan pembiayaan daerah yang lain.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran indeks pertumbuhan ekonomi daerah harus lebih luas lingkungannya seperti lapangan usaha dan pendapatan perkapita.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya lebih teliti dalam memilih tahun periode data yang diambil, agar data yang diukur bukan merupakan data sementara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti dana bagi hasil, dan laporan pembiayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Arina, Meylani M. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 20, No. 1.
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi II*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan, M. L. (penulis), & Guritno, D. (penerjemah). 2016. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Cetakan ke). Jakarta : Rajawali Pers.
- Juwari. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota

di Wilayah Kalimantan. *Jurnal GeoEkonomi*. Vol. 13, No. 1.

Nisa, Aulia Afafun. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1, No. 2.

Mawarni, Darwanis, Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.

Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Lisa, Yulianus, Priyagus, Roy, Juliansyah Roy. 2017. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia. *JeBM*. Vol.19, No.2.

Putri, Zuwesty Eka. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.

Rahman, Yozi Aulia dan Chamelia, Ayunda Lintang. 2015. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *JEJAK*. Vol. 8, No. 1.

Sugiyono. 2016. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung

Sujarweni, Wiratna. 2019. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru: Yogyakarta

Talangamin, Olvy Beatriks, Kindangen, Paulus, Koleangan, Rosalina A.M. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19, No. 7.

Widiasmara, Anny. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *JIFA*. Vol. 2, No. 1. ISSN : 2615-1774

www.dpr.go.id. 2004. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.

www.dpr.go.id. 2004. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Dpr*.

www.djpk.kemenkeu.go.id. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

www.ditjenpp.kemenkumham.go.id. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

www.dpr.go.id. 1992. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.